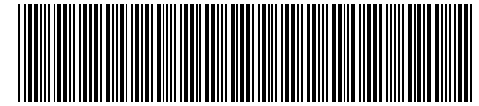




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667789/2024**



DS:7758-5704-8700-2346

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
 4. Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
- Sebesar : Rp. 1.146.343.000 (SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.146.343.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 1.146.343.000

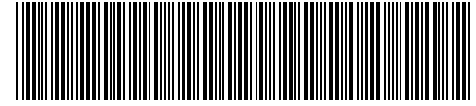
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024



DS:7758-5704-8700-2346

Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	133.835.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	133.835.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.012.508.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.012.508.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			133.835.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			133.835.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	36.249.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	36.249.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	97.586.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	97.586.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.012.508.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.012.508.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap dari usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	90.267.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	8,00	Lembaga	90.267.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17,00	Kelompok Masyarakat	123.500.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	34.422.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 2

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				Kelompok Masyarakat		
	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	89.078.000
Klasifikasi Rincian Output	3	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan Lembaga	125.136.000
Rincian Output	: 01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	7,00	Lembaga	125.136.000
Klasifikasi Rincian Output	4	4841.PDE	Akreditasi Lembaga	7,00	Lembaga, Unit Kerja	94.915.000
Rincian Output	: 01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	7,00	Lembaga	94.915.000
Klasifikasi Rincian Output	5	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	63,00	Orang	504.000.000
Rincian Output	: 01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	63,00	Orang	504.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	74.690.000
Rincian Output	: 01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	7,00	Kegiatan	74.690.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667789	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	-	1.137.343	9.000	-	-	1.146.343		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	133.835	-	-	-	133.835		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	133.835	-	-	-	133.835		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	36.249	-	-	-	36.249	32.00	
01	RM	-	36.249	-	-	-	36.249	009	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	97.586	-	-	-	97.586	32.00	
01	RM	-	97.586	-	-	-	97.586	009	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.003.508	9.000	-	-	1.012.508		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.003.508	9.000	-	-	1.012.508		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	81.267	9.000	-	-	90.267	32.00	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



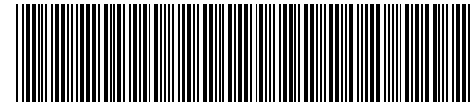
DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	81.267	9.000	-	-	90.267	009	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	123.500	-	-	-	123.500	32 .00	
01 RM		-	123.500	-	-	-	123.500	009	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	125.136	-	-	-	125.136	32 .00	
01 RM		-	125.136	-	-	-	125.136	009	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	94.915	-	-	-	94.915	32 .00	
01 RM		-	94.915	-	-	-	94.915	009	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	504.000	-	-	-	504.000	32 .00	
01 RM		-	504.000	-	-	-	504.000	009	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Kewenangan : (KD)

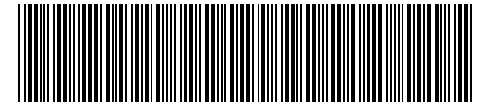
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (32.00 KEPULAUAN RIAU / KEPULAUAN RIAU)	-	74.690	-	-	-	74.690	32 . 00	
01 RM		-	74.690	-	-	-	74.690	009	
JUMLAH		-	1.137.343	9.000	-	-	1.146.343		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

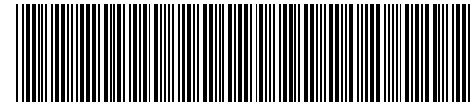
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667789	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	9.155	47.438	122.987	141.454	125.752	134.282	137.327	86.505	177.612	124.672	25.229	13.930	1.146.343
		BELANJA BARANG	8.583	47.438	117.838	141.454	125.752	131.004	137.327	86.505	177.612	124.672	25.229	13.930	1.137.343
		BELANJA MODAL	572	0	5.149	0	0	3.278	0	0	0	0	0	0	9.000
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	1.700	2.785	16.471	13.794	15.062	39.557	18.814	8.111	13.581	1.410	2.550	133.835
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.700	2.785	16.471	13.794	15.062	39.557	18.814	8.111	13.581	1.410	2.550	133.835
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	9.155	45.738	120.202	124.983	111.958	119.220	97.770	67.691	169.501	111.091	23.819	11.380	1.012.508
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	8.583	45.738	115.053	124.983	111.958	115.942	97.770	67.691	169.501	111.091	23.819	11.380	1.003.508
		53 BELANJA MODAL	572	0	5.149	0	0	3.278	0	0	0	0	0	0	9.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
IV A. B L O K I R**



DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667789] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

tt.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:7758-5704-8700-2346

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667789] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

tt.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001